

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xiv
BAB I - PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Metode Penelitian	6
1.5.1 Tipe Penelitian Hukum	6
1.5.3 Sumber Bahan Hukum	7
1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	8
1.5.5 Analisa Bahan Hukum	9
1.5.6 Pertanggungjawaban Sistematis.....	9
BAB II - HAK PEMEGANG SAHAM ATAS KEUNTUNGAN PERSEROAN TERBATAS	11
2.1 Hubungan Hukum Pemegang Saham dengan Perseroan Terbatas	11

2.2	Pembagian Keuntungan Perseroan Terbatas.....	18
2.2.1	Memutuskan untuk Membagikan atau Tidak Membagikan Keuntungan Melalui RUPS.....	18
2.3	Wewenang Pembagian Keuntungan Perseroan Terbatas.....	32
2.4	Akibat Hukum Pembagian Keuntungan Perseroan Terbatas.....	36
2.4.1	Penuntutan Pembayaran Dividen oleh Pemegang Saham	36
BAB III - UPAYA HUKUM UNTUK MENUNTUT PEMBAYARAN DIVIDEN YANG TELAH DIPUTUS UNTUK DIBAGIKAN		
3.1	Langkah-langkah di Luar Pengadilan yang Dapat Dilakukan Pemegang Saham.....	43
3.2	Gugatan Perdata	52
3.3	Permohonan Pailit terhadap PT	60
BAB IV - PENUTUP		
4.1	Kesimpulan	67
4.2	Saran	67
DAFTAR BACAAN.....		
		xv

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3872).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4432).

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4443).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 374, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5644).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6031).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.04/2017 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Perusahaan Publik (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6166).

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus.